

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pantai yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah. Sehingga daerah pantai menjadi perhatian dan tumpuhan harapan dalam menyelesaikan penyediaan hunian penduduk perkotaan. Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur, dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi.

Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Bontobahari, Kelurahan Tanah Lemo, Reklamasi pesisir pantai juga dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan investor untuk membangun tempat pelelangan ikan (TPI). Kelurahan Tanah Lemo dipilih sebagai tempat untuk membuat TPI karena pemerintah dan investor melihat Kecamatan Bontobahari memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perikanan. Pembangunan TPI ini di gadang-gadang akan menjadi tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Bulukumba, akan tetapi banyak pihak yang kurang setuju dengan proyek pembangunan tersebut.

Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan, dimana

lahan eksisting yang terbatas luasan dan kondisinya harus dijadikan dan diubah menjadi lahan yang produktif untuk jasa dan kegiatan perkotaan.

Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Asumsi yang di gunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya akan menambah pendapatan asli daerah.

Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun di ingat pula bahwa bagaimanapun reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Melalui suatu pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan suatu lapangan kerja baru dapat dikatakan lebih baik, sehingga dapat mengatasi berbagai macam persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi lainnya.

Pembangunan pada hakekatnya suatu proses tranformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita-citakan dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu di perhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Pembangunan saat ini lebih mengarah besar pada ekonomi semata yakni penguatan infrakstruktur ekonomi atau memodernisasi ekonomi, hal ini sejalan dengan falsafah dasar modernisasi itu sendiri, dengan kata lain jika ingin maju dan moderen maka struktur kelokalan atau ketradisional harus dihilangkan.

Seperti yang kita lihat saat ini secara fisik misalnya hadirnya bangunan pencakar langit, mall, industrilisasi, dan lain-lain. Secara nonfisik misalnya lahirnya budaya moderen, konsumtif, individualistik, instusi politik yang rasional, dan bukan lagi mistik atau tahayul. Semangat pembangunanisme ini juga disalah kaprakan dengan banyak mengusur aspek

sosial, budaya dan lain-lain. Hal yang sama juga terjadi di kota tidore maluku utara, pesatnya pembangunan di kota ini yang itu kemudian membuat lahan menjadi terbatas, akibatnya geliat pembangunan dengan cara mereklamasi pantai di pesisir pantai tidore sangat gencar dilakukan namun juga menyisakan persoalan baik, persoalan sosial, lingkungan, dan lain-lain. Alih-alih ingin menjadikan kota ini sebagai kota pantai namun mengurus masyarakatnya sendiri (kasus relokasi masyarakat cobodoe dan goto).

Ada beberapa pola perkembangan daerah terbangun di daerah pantai yang umumnya berkembang karena adanya potensi ekonomi, strategi pertahanan dan sebagai pusat pemerintahan dan kebanyakan penggunaan tanah daerah pantai lebih berorientasi ekonomis.

Setidaknya ada beberapa teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis terjadinya perubahan sosial ekonomi. Hal ini menurut Prof. Dr. M.Tahir Kasnawi setidaknya ada beberapa teori perubahan sosial ekonomi yaitu pendekatan teori klasik, pendekatan teori equilibrium, pendekatan teori modernisasi, dan pendekatan teori konflik.

Secara teoritis Ekonomi kelautan belum menjadi sebuah kajian khusus di Indonesia lebih dominan menyangkut ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Tidore adalah salah satu Kota di Maluku Utara di mana seluruh wilayahnya bersentuhan dengan laut sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Majene, pemukiman yang paling menonjol di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat adalah warga nelayan yang bermukim di sepanjang pantai Kabupaten Majene. Warga yang bermukim pada daerah ini tergolong miskin sehingga kawasan terlihat kumuh. Upaya penetasan penduduk nelayan miskin ini jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Pada era 70-an wilayah pesisirnya kaya akan terumbu karang dan biaota-bioata laut, serta laimun, sebagian penduduk bergantung pada hasil-hasil laut di antaranya sebagai nelayan mancing dan nelayan jaring air dangkal ada juga beberapa jenis karang dan kepiting yang di dimanfaatkan warga untuk dikonsumsi sebagai pengganti ikan jika tidak

melaut pada waktu musim pengombak. Kini setelah terlaksanakan proyek reklamasi pantai yang berdampak pada kesehatan, kondisi sosial masyarakat.

Hal ini juga dipasrahkan dengan kondisi draenase reklamasi pantai yang kurang baik akibatnya saluran keluar masuk air tidak lancar akibatnya terjadi penumpukan sampah, warna air berubah kecoklatan dan terjadi penumpukan sampah yang banyak di bawah rumah warga sehingga banyak warga yang mengeluh, akibat dari penumpukan sampah tersebut.

Pembangunan bukanlah sesuatu yang tersedia oleh alam atau terlahir secara alamiah, tetapi pembangunan merupakan hasil dari proses politik oleh aktor-aktor politik yang di dalam proses tersebut terdapat intrik dan kepentingan, hingga perjuangan-perjuangan yang memberikan implikasi-implikasi politik. Tidaklah mengherankan jika kemudian banyak studi pembangunan menempatkan peran pemerintah sebagai subjek utama pembangunan dan memperlakukan rakyat sebagai objek (penerima) pembangunan atau partisipan pembangunan. Sedikit telah diuraikan diatas secara normatif jelas memiliki makna yang positif. Untuk membangun, demi perbaikan, namun pembangunan juga mengandung berbagai kepentingan tentang bagaimana orang, kelompok, dan bahkan negara campur tangan dan tujuannya dalam pembangunan yang direncanakan agar kepentingan-kepentingannya diakomodasi.

Tidak mengherankan jika pakar pembangunan seperti Mansour Faqih menyebutkan bahwa diskursus pembangunan adalah persoalan sosial dan politik. Konsep pembangunan tergantung kepada kekuasaan hegemoni dominan baik di tingkat lokal, regional maupun global. Jika pembangunan dipahami sebagai arena politik, maka sesungguhnya aktor di dalamnya memiliki kecenderungan untuk meraih kekuasaan melalui hegemoni yang dimilikinya sehingga bisa mengendalikan individu, kelompok, negara, dan bahkan kepada negara lain. Pada tingkat lokal misalnya, para aktor maupun pemilik hegemoni kekuasaan berperan aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada tahap implementasi pembangunan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan sempit di wilayah pesisir adalah dengan melakukan reklamasi pantai. Seperti yang di jelaskan salah satu pakar pembangunan Easton (1985) pembangunan adalah Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur. *Pertama*, adanya *input*, yaitu bahan masukan konservasi. *Kedua*, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. *Ketiga*, adanya *output*, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 pasal 34 juga disebutkan reklamasi hanya bisa dilakukan apabila manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari biaya ekonomi dan biaya sosial. Namun demikian pelaksanaan reklamasi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti :

- a. Keberlanjutan dan penghidupan masyarakat.
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir.
- c. Memenuhi persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Sedangkan berdasarkan Permen PU No. 40 Tahun 2007, Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa tehnik untuk pengembangan kawasan baru, sementara menurut Ensiklopedi nasional Indonesia (1990) reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi masalah pokok adalah:

1. Apakah pengembangan pusat ekonomi baru pada area pesisir pantai mampu memberi dampak terhadap aspek sosial ekonomi (pendapatan) warga masyarakat di Kelurahan Cobodoe dan Goto?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dampak pengembangan pusat ekonomi baru pada area pesisir pantai terhadap aspek sosial ekonomi (pendapatan) warga masyarakat di Kelurahan Cobodoe dan Goto

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi para penguasa dan pengusaha agar lebih bijaksan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan reklamasi pantai.
2. Bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian di bidang yang sama, baik sebagai kelanjutan dari penelitian ini di kota yang sama atau di daerah lain.